

FORKOPIMDA

KETERLALUAN ! Oknum Aparat Desa Pari Diduga Potong Dana Bansos Warga Miskin

AndangSuherman - PANDEGLANG.FORKOPIMDA.COM

Dec 5, 2023 - 09:59



Ilustrasi

PANDEGLANG, BANTEN, - Beredar pesan suara atau Voice Note (VN) WhatsApp pengakuan warga perihal dugaan pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) oleh oknum aparat Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, sebesar 10 persen dari nilai bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berikut isi pesan suara salah satu warga penerima manfaat, " Tadi yang membagikan barecode nya salah satu KPM yang diutus pihak desa dan menjelaskan kepada KPM kalau bantuan sosial itu disuruh pihak desa harus dipotong 10 persen per KPM dari nilai bantuan yang diterima, misal bantuan Rp.100.000 dipotong Rp.10.000,"

NO	NAMA	NOMINAL	KEY
1	KUNDIAH	1.100.000	PKH, BPNT
2	SUKAMRI	225.000	PKH
3	SAMMANAH	225.000	PKH
4	AMMANAH	600.000	BPNT
5	ARAH	1.350.000	PKH, BPNT
6	JARAH	1.575.000	PKH
7	MASIAH	1.425.000	PKH, BPNT
8	MASIAH	1.425.000	PKH, BPNT
9	MISNAN	600.000	BPNT
10	MUNAH	1.325.000	PKH, BPNT
11	MURNAN	1.225.000	PKH, BPNT
12	SUPANAH	1.200.000	PKH, BPNT
13	PIRMANAH	600.000	BPNT
14	NURWATI	1.325.000	PKH, BPNT
15	HOLIAH	600.000	BPNT
16	LASIKAH	600.000	BPNT
17	LANGE	600.000	BPNT
18	ENI	600.000	BPNT
19	NURI HARISKA	525.000	PKH, BPNT
20	ELIS	750.000	PKH, BPNT
1	SUPIYATI	1.325.000	PKH
1	SUKANAH	600.000	PKH, BPNT
1	SUMI	600.000	BPNT
1	LULPIAH	1.325.000	PKH, BPNT
1	LUUM	600.000	BPNT
		600.000	BPNT

Selain pesan suara beredar pula, data nama-nama penerima manfaat yang menyeter uang bantuannya dengan nominal bervariasi, mulai dari nilai Rp.22.000,- hingga Rp. 172.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hasil penelusuran awak media ini, bantuan sosial yang diduga dipotong oknum aparat desa tersebut merupakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) gelombang 3 pada Bulan Oktober lalu.

Sementara oknum Kepala Desa Pari inisial Y saat dikonfirmasi indonesiasatu.co.id melalui telepon selular maupun pesan singkat whatsapp yang bersangkutan tidak menanggapi.

Namun dikutip dari media online seanteronews, Oknum Kades Pari Y menyangkal dengan dalih bahwa data nama penerima manfaat yang beredar luas di kalangan masyarakat adalah data palsu.

" Itu data palsu nama para penerima juga tidak tercantum didata itu." dalih oknum kades dalam pesan WhatsApp nya***